**Pemkot Mataram Alokasikan Rp5,5 milar Untuk Pembangunan Kantor BKPSDM**



*Ilustrasi*

https://www.bing.com/images/search?

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 miliar pada 2021 untuk merampungkan pembangunan gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Jalan Lingkar Selatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram H Miftahurrahman di Mataram, Jumat, mengatakan selain untuk pembangunan gedung kantor BKPSDM di kompleks perkantoran Pemerintah Kota Mataram itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan musala.

“Musala itu sebagai bagian fasilitas[[1]](#endnote-1) pendukung, karena kawasan tersebut sudah menjadi kompleks perkantoran Pemerintah Kota Mataram, sehingga banyak masyarakat yang datang pelayanan membutuhkan fasilitas musala,” katanya. Dikatakan, pembangunan gedung Kantor BKPSDM dan musala menjadi prioritas proyek fisik tahun 2021, agar gedung BKPSDM bisa segera dimanfaatkan.

Sementara untuk proyek penataan lanskap[[2]](#endnote-2) areal komplek perkantoran Pemerintah Kota Mataram, jika memungkinkan diusulkan tahun 2022.

“Kalau lanskap kita kerjakan juga, sementara pembangunan gedung kantor belum tuntas, dikhawatirkan akan rusak lagi karena mobilisasi alat berat,” katanya. Kegiatan fisik tahun 2021, sambungnya, sangat selektif dan dengan skala prioritas sebab fokus anggaran tahun 2021 masih untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pemberdayaan ekonomi pasca-COVID-19.

“Kita juga tidak ingin ada proyek yang mangkrak karena anggaran terbatas. Karena itulah, proyek fisik tahun depan menggunakan skala prioritas[[3]](#endnote-3),” katanya lagi. Termasuk untuk pengerjaan lanskap Monumen Mataram di Jalan Lingkar, tambah Miftahurrahman, pada tahun 2021 akan dikerjakan dengan alokasi anggaran sekitar Rp500 juta. BKPSDM Kota Mataram saat ini menempati kantor di Jalan Pejanggik tepatnya depan Kantor Cabang Utama BRI. Gedung tersebut merupakan gedung sementara yang sifatnya sewa.

“Harapan kita, jika tahun depan gedung Kantor BKPSDM bisa rampung, maka BKPSDM sudah bisa langsung pindah menempati gedung baru,” katanya. (Ant)

 **Catatan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.[[4]](#footnote-1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.[[5]](#footnote-2)

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:

1. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
2. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
3. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.[[6]](#footnote-3)

Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:

1. kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
2. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
3. rancangan peraturan daerah tentang APBD;
4. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
5. perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;
6. rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
7. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD; dan
8. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.[[7]](#footnote-4)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-alokasikan-rp55-milar-untuk-pembangunan-kantor-bkpsdm/tanggal> 27 November 2020 dan
2. <https://akurat.co/ekonomi/id-1241568-read-pemkot-mataram-alokasikan-dana-rp5-5-milar-untuk-pembangunan-kantor-bkpsdm/tanggal> 20 November 2020;

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. fasilitas/fa·si·li·tas/ n sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan -- sosial fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah; -- umum fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan dan alat penerangan umum; [vide: https://www.kbbi.web.id/fasilitas] [↑](#endnote-ref-1)
2. lanskap/lan·skap/ n 1 tata ruang di luar gedung (untuk mengatur pemandangan alam): saya membuat desain-desain --; 2 jumlah total aspek setiap daerah, baik pedesaan maupun kota; [vide: https://www.kbbi.web.id/lanskap] [↑](#endnote-ref-2)
3. prioritas/pri·o·ri·tas/ n yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain: pembicaraan mengenai undang-undang antikorupsi diberi -- dalam parlemen; memprioritaskan/mem·pri·o·ri·tas·kan/ v mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain [vide: https://www.kbbi.web.id/prioritas] [↑](#endnote-ref-3)
4. Pasal 1 angka 1 Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [↑](#footnote-ref-1)
5. Pasal 1 angka 2 Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [↑](#footnote-ref-2)
6. Pasal 5 Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [↑](#footnote-ref-3)
7. Pasal 3 angka 1 Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [↑](#footnote-ref-4)